
KEBIJAKAN EKONOMI DIGITAL DIANTARA PELUANG DAN ANCAMAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh

Budi Pramono¹, Lukman Yudho Prakoso², Gabriel Choirul Alman³, Rianto⁴, Yudi Sutrasna⁵, Edy Sulistyadi⁶, Sri Murtiana⁷, Haetami⁸, Arifuddin Uksan⁹, Hikmat Zakky Almubaroq¹⁰

¹Dewan Ketahanan Nasional,

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

^{2,5,6,7,8,9,10} Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

³Brawijaya University

Jl. MT. Haryono No.163, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

⁴STP Trisakti

Jl. IKPN Bintaro No.1, RT.4/RW.10, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330

Koresponden email: ²lukman.prakoso@idu.ac.id

Article History:

Received: 22-06-2022

Revised: 16-06-2022

Accepted: 25-07-2022

Keywords:

Ekonomi, Digital, Implementasi, Kebijakan, Peluang, Ancaman, Fusion Center.

Abstract: Digitalisasi ekonomi menembus batas wilayah negara dan kedaulatan ekonomi yang dapat saja menjadi peluang atau ancaman. Digitalisasi tidak bisa dihindari, tetap permasalahan utamanya adalah bagaimana negara ini harus dapat merumuskan kebijakan agar masyarakat kita jangan hanya menjadi sapi perahan pihak yang-pihak lain. Dalam penelitian studi literatur ini penulis akan menganalisis bagaimana upaya terbaik setelah menemukan implementasinya saat ini. Menggunakan teori implementasi kebijakan pertahanan Lukman Yudho Prakoso hasil penelitian menunjukkan belum terintegrasinya kebijakan ekonomi digital terkait kementerian dan Lembaga, interaktif antara stake holder belum terwujud, transparansi untuk melihat efektifitas ekonomi digital belum terlihat secara menyeluruh dampak tidak tergrasinya kebijakan, kontrol terhadap ekonomi digital belum efektif, dari faktor akuntabel masih belum ada *big data* yang bisa menjadi evaluasi terpercaya kemanfaatan ekonomi digital. *Sebagai kesimpulan yang menjadi temuan baru pada penelitian ini adalah perlunya dibentuk ekonomi digital fusion center agar mendorong kemanfaatan untuk menghindari hal menjadi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.*

PENDAHULUAN

Digitalisasi keharusan yang tidak bisa dihindari dampak globalisasi. Pengembangan ekonomi digital menjadi salah satu strategi utama transformasi ekonomi Indonesia dan ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pengembangan ekonomi digital ini juga didorong oleh adanya pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai sektor.

Tren positif perkembangan ekonomi digital juga sejalan dengan perkembangan investasi. Hasil studi Google, Temasek, Bain & Company (2021) menunjukkan bahwa nilai investasi ekonomi digital Indonesia sepanjang Q1-2021 sebesar 4,7 miliar USD dan telah melampaui nilai tertinggi selama empat tahun terakhir. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, melampaui Singapura.

Selain investasi, Indonesia juga memiliki berbagai potensi yang dapat memperkuat peluang akselerasi perkembangan ekonomi digital. Pada tahun 2021 nilai transaksi e-commerce Indonesia berhasil mencapai Rp401,25 Triliun, dengan volume transaksi sebesar 1,73 miliar.[1]

Perusahaan keamanan cloud, Menlo Security Inc. mengatakan, pertumbuhan digital yang begitu pesat seringkali diikuti oleh peningkatan ancaman siber yang signifikan. Sebuah laporan terbaru oleh *National Cyber Security Index* (NCSI) menunjukkan bahwa keamanan siber Indonesia berada di peringkat ke-6 di antara negara-negara ASEAN lainnya dan ke-83 dari 160 negara secara global. Sebuah laporan Interpol juga menegaskan hal ini dengan menyebutkan bahwa sekitar 2,7 juta ransomware terdeteksi di negara-negara ASEAN sepanjang tahun 2021 dan Indonesia memimpin dengan 1,3 juta kasus.[2]

Ancaman-ancaman siber pada umumnya menasar perusahaan besar dan institusi pemerintahan, terutama dalam tiga tahun terakhir. Salah satu alasan utamanya adalah jaringan lama (*legacy network*) dan infrastruktur keamanan jaringan tidak lagi mampu mengakomodir cara bekerja orang pada lanskap modern saat ini, termasuk dalam mencegah *Highly Evasive Adaptive Threats* (HEAT) yang dapat mengakibatkan ransomware.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi ekonomi digital saat ini, dengan melihat peluang dan kendala yang dihadapi, selanjutnya akan merumuskan model bagaimana agar ekonomi digital terutama pada masa pandemic covid-19 dapat memberikan kemanfaatan optimal untuk masyarakat dan dapat menekan semaksimal mungkin dampak buruk yang kemungkinan dapat terjadi.

METODE PENELITIAN

a. Metode Deskriptif Kualitatif Studi Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi Pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama [3]. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti [4].

b. Teori Implementasi kebijakan pertahanan Lukman Yudho Prakoso (IITCA).

Kebijakan publik di sektor pertahanan merupakan salah satu faktor penting yang ikut berperan dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasional. Kebijakan dapat menghasilkan manfaat secara optimal jika diimplementasikan dengan tepat, yaitu dengan

mempertimbangkan dan memenuhi beragam faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Menurut Prakoso (2016), faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor Integrative, Interactive, Transparency, Controlling dan Accountability (IITCA).[5]

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Kebijakan ekonomi digital di era Pandemi Covid-19

1) Integratif.

Telah dilaksanakan kegiatan yang dimaksudkan untuk sinergitas pengintegrasian ekonomi digital melalui Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021, yang merupakan perhelatan pertama di Indonesia. Mengangkat tema "Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia", FEKDI digelar selama 4 hari berturut-turut pada 5-8 April 2021 secara virtual dengan format peluncuran (launching), pameran (showcase), diskusi, wawasan pimpinan (leader's insight), dan gelar wicara (talkshow). FEKDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan acara, juga dilakukan peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021. Pembentukan Satgas P2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama untuk: (i) mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta (ii) mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Dalam rangka penguatan koordinasi antara Pusat dan Daerah, di tingkat daerah juga dibentuk TP2DD, baik untuk tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang diketuai oleh Kepala Daerah. Jumlah TP2DD yang telah terbentuk sebanyak 135 baik di tingkat Provinsi maupun Kotamadya/Kabupaten di seluruh Indonesia.[6]

2) Interaktif.

Implementasi kebijakan ekonomi digital diantara peluang dan ancaman di masa pandemi covid-19 membutuhkan adanya proses komunikasi yang bersifat interaktif, sehingga memungkinkan tersampainya berbagai informasi penting antar pihak yang menjadi pelaksana kebijakan. Komunikasi yang interaktif juga dapat meminimalis penolakan yang terjadi atas kebijakan yang diimplementasikan karena adanya pemahaman yang lengkap terhadap tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan.

3) Transparan.

Faktor ini pada kebijakan ekonomi digital diantara peluang dan ancaman di masa pandemi covid-19 sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara dan kebijakan pertahanan yang diimplementasikan. Dengan adanya transparansi, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya untuk dapat mengawasi negara. Pada umumnya, transparansi berkaitan dengan transparansi dalam hal perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran.

4) Kontrol.

Merupakan faktor yang menentukan kesesuaian antara implementasi kebijakan ekonomi

digital diantara peluang dan ancaman di masa pandemi covid-19 dengan rencana kebijakan. Dengan adanya pengawasan, maka berbagai kesalahan yang terjadi selama proses implementasi dapat terdeteksi dengan segera dan dapat dicarikan solusi yang paling tepat, sehingga implementasi kebijakan dapat tetap berjalan dengan arah yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

5) Akuntabel.

Faktor yang menjadi pembentuk utama dari kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi digital diantara peluang dan ancaman di masa pandemi covid-19 dan lembaga yang berwenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Akuntabilitas merupakan hasil dari pelaksanaan tanggung jawab, yang dapat dicapai seiring dengan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat atas manfaat dari segala aktivitas dari lembaga

pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas dapat terbentuk melalui pelaksanaan sosialisasi secara terbuka terhadap masyarakat yang merupakan pihak yang memberi amanat kepada lembaga pemerintahan dalam proses pembangunan kekuatan pertahanan melalui implementasi kebijakan publik di bidang pertahanan

b. Peluang dan Ancaman

1) Peluang.

Ekonomi digital memang memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Laporan dari Oxford Economics (2016) menyebutkan bahwa keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah lapangan kerja di Indonesia. Secara khusus, setiap 1 persen peningkatan penetrasi mobile diproyeksikan menyumbang tambahan 640 juta US Dollar kepada PDB Indonesia serta membuka 10.700 lapangan kerja baru pada tahun 2020. Kontribusi sektor TIK makin terasa signifikan terhadap PDB Indonesia, mengingat sektor TIK menyumbang 7.2 persen dari total PDB Indonesia. Walaupun angka ini masih jauh dibandingkan sektor lain, namun sektor TIK mengalami pertumbuhan sekitar 10 persen yang merupakan pertumbuhan terbesar dibandingkan sektor lain. Pertumbuhan ini pun juga jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan rata-rata PDB nasional yang hanya 5 persen. Maka tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap sektor ekonomi digital.[7]

2) Ancaman.

Cyber security masih menjadi tantangan primer di banyak sekali negara pada hal perekonomian digital. Begitu jua dengan investasi digital ekonomi Indonesia. menjadi negara berkembang yang mempunyai peluang besar , Indonesia memiliki arus transaksi online yg semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yg tidak bertanggung jawab buat melakukan penyerangan terhadap global cyber. Bahkan negara kita pernah menerima 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya.

Galat satu bentuk serangan cyber ini artinya ransomware yg bisa menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh serta Malaysia. Akibatnya, kerugian yg cukup akbar pun tidak bisa dihindari. sang karena itu, krusial bagi

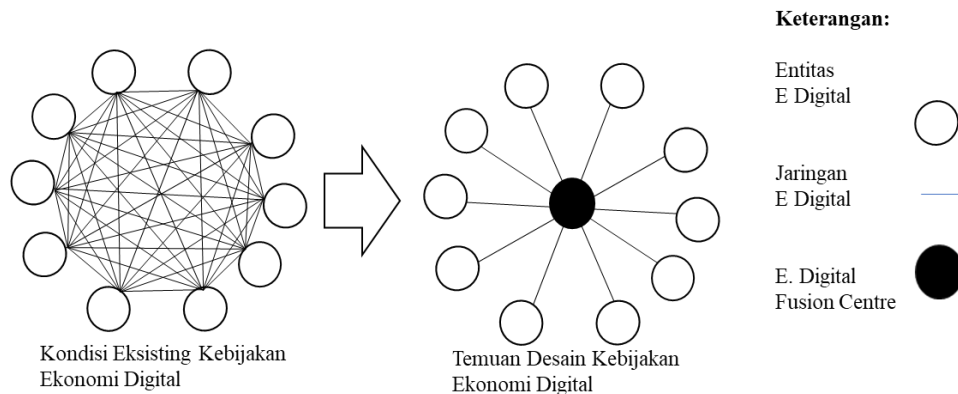
pemerintah membentuk sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi Ekonomi digital.

Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia menggunakan praktis. Akibatnya, produk-produk lokal pun Jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk asal negara lain yg cenderung dijual dengan harga terjangkau.

contohnya saja membanjirnya produk-produk berasal Cina, Singapura, juga Jepang. Ditambah lagi sat ini masih minim produk dari UMKM yg masuk pada ranah e-commerce. di sinilah dibutuhkan adanya sinergi berasal pihak pemerintah juga partikelir agar produk lokal ini dapat bersaing. Baik melalui pembinaan hingga donasi inovasi agar pada masa mendatang produk lokal dapat menikmati laba berasal adanya investasi digital ekonomi Indonesia.

c. Solusi Fusion Center Ekonomi Digital.

Implementasi kebijakan ekonomi digital diantara peluang dan ancaman di masa pandemi covid-19 memiliki peluang yang sangat baik, namun tetap harus memerhatikan bahwa tetap ada tantangan dan hambatan yang bisa menjadi ancaman. Hal ini harus juga diperhitungkan dan dicarikan solusinya, sehingga kemanfaatan sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembahasan yang telah di dilaksanakan pada bagian sebelumnya dapat menjadi dasar dalam meberikan solusi seperti di bawah ini.



Gambar 1. Taksonomi Fusion Center Ekonomi Digital

Kondisi saat ini, pelaksanaan kebijakan terkait kebijakan ekonomi digital diantara peluang dan ancaman di masa pandemi covid-19, dilaksanakan oleh berbagai entitas dengan masih melakukan proses yang belum terintegrasi secara penuh, sehingga masih memungkinkan terjadinya permasalahan yang tidak terkoordinasi satu sama lain entitas terkait.

Peneliti merekomendasikan transformasi jaringan kerja yang semula adalah menggunakan jaringan Star seperti pada gambar di atas, ditransformasikan ke dalam bentuk jaringan roda, dimana perlu ada koordinator terpusat (*Digital Fusion Center*) agar segala keputusan yang diambil dapat terkoordinir drngan baik, sehingga jika ada gangguan hambatan dan ancaman dapat di respon dengan cepat.

KESIMPULAN

Statement of the art solusi kebijakan ekonomi digital diantara peluang dan ancaman di

masa pandemi covid-19 untuk mendapatkan kemanfaatan bukan menjadi ancaman kedaulatan ekonomi dengan melaksanakan implementasi kebijakan secara terintegrasi, interaktif melalui adanya ekonomi *digital fusion center* agar mendorong kemanfaatan untuk menghindari hal menjadi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Airlangga Sutarto (2022), Menko Airlangga: Ekonomi Digital di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41127/menko-airlangga-ekonomi-digital-di-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara/0/berita>, dikutip tanggal 26 September 2022
- [2] Merdeka (2022), Hati-Hati, Pertumbuhan Ekonomi Digital Berpotensi Diikuti Ancaman Siber, <https://www.merdeka.com/uang/hati-hati-pertumbuhan-ekonomi-digital-berpotensi-diikuti-ancaman-siber.html>, dikutip tanggal 26 september 2022
- [3] Hadi, S. 1995. Metodologi Research Jilid 3. Metodologi Research Jilid 3. Yogyakarta: Andi Offset.
- [4] Ida Bagoes Mantra. 2008. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [5] Prakoso, L. Y. (2016). Akuntabilitas kinerja pengadaan barang jasa di akademi Angkatan Laut Surabaya (Studi model akuntabilitas kinerja berbasis Good Governance dalam pengadaan barang jasa alat instruksi/alat penolong instruksi). Universitas 17 Agustus 1945.
- [6] Bank Indonesia (2021), PERHELATAN FEKDI 2021: BAROMETER PERKEMBANGAN EKONOMI KEUANGAN DIGITAL INDONESIA, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_238621.aspx, dikutip tanggal 26 September 2022
- [7] Wirawan Agahari (2017), Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia, https://cipg.or.id/id/blog_article/peluang-dan-tantangan-ekonomi-digital-di-indonesia/, dikutip tanggal 26 September 2022